

LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA  
(GCG)PT. BPR SEDANA YASA  
TAHUN 2023



**PT. BPR SEDANA YASA**

BR. TENGAH DESA PEKEN BELAYU MARGA  
TELEPON: (0361) 7995422



## BAB I

### PENJELASAN UMUM

Sebagai sebuah lembaga perbankan yang dipercaya oleh Pemerintah dalam mengelola dana masyarakat, Manajemen sadar bahwa kepercayaan publik terhadap BPR SEDANA YASA disamping tergantung pada kinerja dan kemampuan Bank dalam mengelola risiko, juga diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, integritas dari para pengurus serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada Publik, perwujudan dari pemikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila Bank dalam melakukan aktivitasnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi lima prinsip dasar sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG tersebut di atas telah diterapkan PT. BPR SEDANA YASA sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dengan komitmen untuk mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta menciptakan suatu nilai yang optimal bagi pemegang saham dan stakeholders pada umumnya.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Drs. I Gede Nyoman Sukerta
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut: a. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat b. Menetapkan, memutuskan dan menyetujui, serta memerintahkan pembayaran dalam rangka realisasi kredit yang diberikan kepada calon nasabah bank c. Menetapkan cara- cara penagihan kembali atas kredit yang telah telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien d. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku e. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank f. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. j. Melaporkan secara berkala kepada dewan komisaris yang disertai dengan langkah- langkah perbaikan yang sedang dan /atau akan dilakukan mengenai : perkembangan dan umlah dana yang dpat dihimpun dari tabungan dan deposito, perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan tidak terkait, kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah			
2.	Nama	:	I Gede Agus Artha Negara, S.T
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan :

- a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- c. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang
- d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Memantau



- dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;
- e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan
- f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila kebijakan atau keputusan yang diambil menyimpang dari peraturan.
- g. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak dari peraturan perundang-undangan

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :**

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Memastikan Tingkat Kesehatan Bank berada dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian punishmen telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Reward juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Sedana Yasa.
- d. Memastikan telah dilaksanakannya monitoring secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2022.
- f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- g. Selalu memperhatikan BMPK agar tidak terjadi pelanggaran mengingat komponen modal selalu berfluktuasi sebagai imbas pembentukan ppap dari kredit macet
- h. Mengintensifkan penagihan setelah tanggal 15 dari bulan bersangkutan
- j. Mengintensifkan mencari investor sebagai langkah pemenuhan modal inti dan mandat RUPS tanggal 8 Mei 2022

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	I Gusti Bagus Mahaputra, SE
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan dari Rencana Kerja yang diajukan Direksi agar pencapaian perusahaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Melakukan pengawasan atas kegiatan operasional yang dipimpin Direksi agar sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perbankan.</p> <p>3. Meminta penjelasan atau laporan dari Direksi atas kegiatan operasional yang telah dilaksanakan.</p> <p>4. Memberikan saran dan masukan kepada Direksi dalam hal penyelesaian permasalahan, perbaikan – perbaikan, ataupun dalam hal usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan.</p> <p>5. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang ataupun tanpa mengundang Direksi, minimal 4 (empat) kali dalam setahun untuk membahas hasil</p>		



	pengawasan yang telah dilakukan selama 3 (tiga) bulan berjalan		
	6. Melaporkan hasil pengawasan terhadap kegiatan operasional bank kepada para pemegang saham, baik dalam forum RUPS tahunan ataupun dalam periode tertentu yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Komisaris.		
	7. Melaporkan hasil pengawasan kegiatan operasional perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap periode 6 (enam) bulan (laporan semester).		
2.	Nama	:	Drs. I Gusti Putu Ardika
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikannasihat kepada Direksi.</li><li>2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan(RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</li><li>3. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.</li><li>4. Mengkaji sistem manajemen.</li><li>5. Memantau efektivitas penerapan Good Corporate Governance dan melaporkannyakepada RUPS.</li><li>6. Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perusahaan untuk dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.</li><li>7. Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantaupelaksanaan penugasan auditor eksternal.</li><li>8. Menyusun pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris sesuai dengankeahlian dan pengalaman.</li></ol>		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mereview penyebab terjadinya penurunan sumber- sumber dana dan peningkatan biaya bunga agar tidak terjadi mis kebijakan Dirut dengan yang diimplementasikan dalam aplikasi core banking bank</li><li>2. Untuk menunjang peningkatan skill SDM disamping perlu mengikuti pelatihan- pelatihan yang sesuai dengan job dari SDM tersebut, disamping itu juga perlu dilakukan penyegaran/ refreasing seluruh karyawan</li><li>3. Meriview kembali pemberian fee baik dana ataupun kredit terhadap karyawan</li><li>4. Hasil kunjungan dari OTS SPI adalah beberapa tidak tepat dalam penggunaan dari pencairan dana kredit. Sehingga berdampak terhadap kemampuan bayar debitur</li><li>5. Terhadap pembinaan nasabah kredit yang bermasalah diutamakan memberikan solusi yang bermanfaat dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung</li><li>6. Meriview kembali karyawan – karyawan yang masih berada dibawah UMR</li><li>7. Memperhatikan dan menekankan risiko- risiko :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Risiko Kredit</li><li>b. Risiko Pasar, termasuk pemberian suku bunga</li><li>c. Risiko Operasional khususnya SDM, system dan administrasi</li><li>d. Risiko Likuiditas sesuai kebutuhan</li><li>e. Risiko Hukum dalam hal pengikatan agunan, Perjanjian – perjanjian, dan lain lain</li><li>f. Risiko Kepatuhan</li><li>g. Risiko Stratejik</li></ol></li><li>8. Agar Direksi senantiasa melakukan perhitungan BMPK agar tidak melanggar ketentuan</li><li>9. Dengan serius melakukan pendekatan terhadap calon investor yang berminat terhadap BPR Sedana Yasa sebagai langkah pemenuhan modal inti 6 (enam) miliar pada akhir tahun 2024 dan sebagai mandat RUPS tanggal 8 Mei 2022</li></ol>		
	Penjelasan Lebih Lanjut :		
	Nihil		



### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Tidak ada rekomendasi tugas dan tanggung jawab Komite	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		



	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. I Gede Nyoman Sukerta	Rp355.000.000	12.19%
2.	I Gede Agus Artha Negara, S.T	Rp100.000.000	3.43%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR adalah sebagai berikut - Untuk Direktur Utama nominal Rp. 355.000.000,- atau 12,19 % - Untuk Direktur nominal Rp. 100.000.000,- atau 3,43 %			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Gede Agus Artha Negara, S.T	601007	PT. BPR Penebel	8.4%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi memiliki saham pada BPR lain - Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan nominal Rp. 1.050.000.000,- prosentase 8,4 %				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs. I Gede Nyoman Sukerta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Gede Agus Artha Negara, S.T	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada





Penjelasan Lebih Lanjut :
---------------------------

Tidak ada hubungan keuangan Anggota Direksi pada BPR
--

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs. I Gede Nyoman Sukerta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Gede Agus Artha Negara, S.T	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak ada hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Gusti Bagus Mahaputra, SE	Rp330.000.000	11.33%
2.	Drs. I Gusti Putu Ardika	Rp625.240.000	21.46%

Penjelasan Lebih Lanjut :
Anggota Dewan Komisaris memiliki saham sebagai berikut - Komisaris Utama Rp. 330.000.000,- sebesar 11,33 % - Komisaris Rp. 625.240.000,- sebesar 22,46 %

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Gusti Bagus Mahaputra, SE	-	-	0%
2.	Drs. I Gusti Putu Ardika	-	-	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR



### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Gusti Bagus Mahaputra, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs. I Gusti Putu Ardika	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Gusti Bagus Mahaputra, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs. I Gusti Putu Ardika	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan(Rp)
1.	Gaji	2	Rp192.000.000	2	Rp114.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp71.679.360	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp263.679.360		Rp114.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS					



## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (1)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai hasil RUPS			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.28 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.11 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.46 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.06 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
nihil	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	10 April 2023	2	a. Dewan Komisaris menyarankan membuat mekanisme pengambilalihan maupun penyelesaian AYDA. b. Dewan Komisaris menyarankan membuat mekanisme penempatan dana pada bank lain. c. Dewan Komisaris menyarankan membuat mekanisme restrukturisasi kredit terdampak



			<p>Covid-19 dan tindak lanjutnya berupa kewajiban pembuatan stress test dampak terhadap permodalan dan likuiditas, dan kewajiban evaluasi prospek usaha.</p> <p>d. Dewan Komisaris menyarankan membuat mekanisme penetapan nilai hak tanggungan/ fidusia.</p> <p>e. Dewan Komisaris menyarankan membuat mekanisme pengikatan yang minimal mengatur dokumen tanda terima penyerahan pengikatan agunan baik pengikatan fidusia maupun hak tanggungan ke notaris seperti register yang ditandatangani baik oleh BPR maupun notaris. Selain itu, untuk pengikatan fidusia tidak dilengkapi dengan covernote. Hal tersebut menyebabkan tidak terpantaunya progress pengikatan agunan.</p> <p>f. Dewan Komisaris menyarankan membuat mekanisme dan jangka waktu pemberian Surat Peringatan 1, 2, dan 3.</p> <p>g. Dewan Komisaris juga meminta kepada pengurus untuk memantau perkembangan calon investor terkait komitmennya.</p> <p>h. Dewan Komisaris menghimbau kepada Direksi untuk mengambil langkah tegas terhadap AYDA.</p>
2.	10 Juli 2023	2	<p>1. Pengamatan dari Dewan Komisaris bahwa Bank belum memberikan kontribusi kepada pemegang saham</p> <p>2. Dewan Komisaris menghimbau kepada Direksi agar Kredit restru COVID-19 segera diselesaikan untuk dijadikan kredit normal sehingga saat pemberlakuan tidak diperpanjang dampak kepada bank tidak signifikan.</p> <p>3. Segera melakukan action plan yang dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal penyelesaian ataupun penyelamatan kredit sehingga hasil pemeriksaan OJK terhadap pembentukan PPAP bisa menjadi lebih kecil.</p> <p>4. Modal inti BPR posisi 31 Januari 2023 sebesar Rp3.489.865.838,00, belum memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Pemegang Saham BPR sebanyak 51 orang dengan kepemilikan tertinggi oleh Sdr. I Gusti Putu Ardika yang juga menjabat sebagai Komisaris BPR sebesar Rp625.240.000,00 (21,46%). Seluruh PS telah membuat surat pernyataan tidak berkeberatan dan setuju untuk menjual seluruh saham yang ada di BPR pada tanggal 6 Juni 2022. Saat ini BPR sedang mengupayakan adanya calon investor dan sedang dalam tahap penjajagan.</p> <p>5. Meriview kembali Struktur Organisasi secara keseluruhan</p>
3.	09 Oktober 2023	2	<p>A. Pelaksanaan tugas dari Audit Intern belum maksimal dengan uraian dibawah</p> <p>a. Belum adanya timeline harian audit internal tahun</p>



			<p>2023.</p> <p>b. Cakupan pemeriksaan PE Audit Internal hanya sebatas administratif seperti pencocokan data KTP dengan system. BPR agar memperluas cakupan pemeriksaan penerapan APU PPT dengan penelitian kewajaran transaksi dengan profil nasabah terkait dengan TKM dan penelitian terkait TKT.</p> <p>c. Pemeriksaan ATI belum dilakukan secara komprehensif, seperti belum seluruh ATI dilengkapi dengan kode asset.</p> <p>d. PE AI tidak memiliki kompetensi di bidang untuk melakukan audit TI. BPR agar mengikutsertakan PEAI dalam pelatihan atau Pendidikan terkait TI.</p> <p>e. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal belum komprehensif, tercermin dari banyaknya pelanggaran kredit yang ditemukan oleh pengawas OJK, namun tidak ditemukan oleh PE AI.</p> <p>f. Terdapat beberapa ketentuan internal dasar yang tidak dimiliki BPR, namun tidak menjadi temuan atau fokus pemeriksaan PE AI.</p> <p>g. Adanya pelanggaran kepatuhan seperti rangkap jabatan TI yang tidak menjadi temuan PE AI.</p> <p>h. Dewan Komisaris tetap mengingatkan dan menegaskan kepada Pengurus agar pemenuhan modal inti yang bersumber dari calon investor agar segera ditindak lanjuti dan dipantau perkembangannya karena sampai dengan saat ini penempatan dana / escrow account tidak kunjung dilaksanakan.</p>
4.	08 Januari 2024	2	<p>a. Komisaris menyarankan sesuai dengan temuan OJK karena BPR belum memiliki ruang server yang memadai. CPU diletakkan di ruang rapat yang tidak dilengkapi dengan ruang steril server, tidak ada pendingin yang memadai, dan tidak ada register akses ruang server. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 20 POJK No.75/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa BPR wajib menerapkan upaya pengamanan yang diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang berpotensi merugikan BPR, BPRS dan/atau nasabahnya. BPR agar menyediakan ruang server yang memadai paling lambat 31 Maret 2023.</p> <p>b. Komisaris juga menyarankan agar di dalam ruang server juga terdapat DVR dan layar monitor CCTV. Berdasarkan konfirmasi dengan Direksi, tidak diketahui besar penyimpanan DVR dan masa retensi rekaman CCTV. Hal tersebut belum diatur dalam SOP Operasional BPR, agar dituangkan dalam SOP operasional paling lambat 31 Maret 2023.</p> <p>c. Sampai dengan saat ini Calon Investor belum juga menempatkan dana / escrow account sebagai bentuk keseriusan untuk melakukan akuisisi sehingga kepada pengurus agar menyampaikan</p>



			kepada pemegang saham lainnya untuk mencari calon investor yang mempunyai keseriusan karenawaktu sampai dengan akhir Desember 2024 untuk memenuhi modal inti 6 miliar rupiah sudah semakin dekat.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dalam rapat 1 tahun yang dilakukan setiap triwulan diperoleh hasil bahwa kinerja bank masih belum stabil sehingga diperlukan perhatian khusus dalam rangka menjalankan operasional sesuai tata kelola yang baik dan benar			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	I Gusti Bagus Mahaputra, SE	4	0	100%
2.	Drs. I Gusti Putu Ardika	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris telah memiliki waktu yang cukup untuk hadir dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kinerja BPR				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal ( internal fraud ) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap pada PT.BPR Sedana Yasa								



## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama periode tahun 2023 pada PT. BPR Sedana Yasa tidak ada transaksi yang mengandung BenturanKepentingan							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	20 Maret 2023	Sosial	DANA PUNIA UPACARA TAWUR KESANGA	DESA ADAT BELAYU	Rp1.000.000
2.	28 Juli 2023	Sosial	SUMBANGAN KEKANTOR DESA PEKEN DALAM RANGKA 17 AGUSTUS	KANTOR DESAPEKEN	Rp1.500.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					



### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR SEDANA YASA  
Alamat : BR. TENGAH DESA PEKEN BELAYU MARGA  
Nomor Telepon : (0361) 7995422 Posisi  
Laporan : Desember 2023 Modal Inti  
: Rp3.213.229.238  
Total Aset : Rp24.418.455.900

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR SEDANA YASA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Cukup Baik (3)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.30	0.260
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5.00	0.750
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.90	0.190
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.90	0.190
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.13	0.113
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.84	0.184
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1.54	0.116
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.30	0.098
Nilai Komposit			2
Predikat Komposit			Cukup Baik





## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.3)

Jumlah anggota Direksi BPR Sedana Yasa telah memenuhi minimal 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 5)

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Sedana Yasa telah memenuhi sebanyak 2 (dua) orang dan tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR Sedana Yasa telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR Sedana Yasa telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.13)

PE Audit Intern di BPR Sedana Yasa telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)

BPR Sedana Yasa telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR

### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.84)



BPR Sedana Yasa telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2(dua) kali dalam setahun.

#### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)

PT. BPR Sedana Yasa telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR Sedana Yasa dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.54)

Rencana Bisnis Bank BPR Sedana Yasa telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.3)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Sedana Yasa telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR Sedana Yasa juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Tata Kelola pada suatu perusahaan sangat penting dilakukan khususnya pada BPR dimana erat kaitannya terhadap perjalanan usaha BPR tersebut maka dari itu Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola untuk mengimplementasikannya operasional BPR Sedana Yasa masih membutuhkan SDM yang berkualitas serta berintegritas untuk posisi yang strategis sehingga performance bank bertahap dapat meningkat sesuai dengan harapan pemegang saham yaitu pemupukan Laba Organik yang muaranyasebagai pemenuhan modal inti.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji



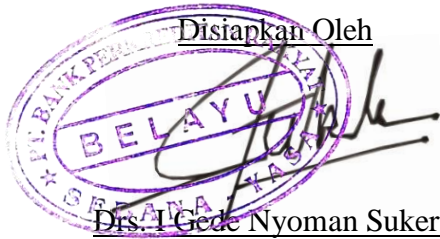
PT. BPR SEDANA YASA

PT. BPR SEDANA YASA  
BR. TENGAH DESA PEKEN BELAYU MARGA  
Telepon: (0361) 7995422

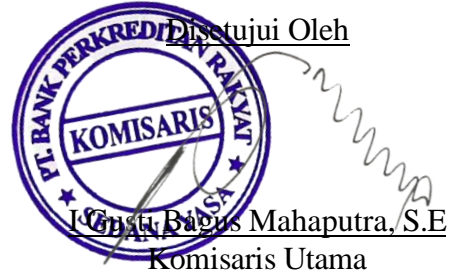
site: <https://www.bprsedanayasa.com>, Email: [bpr\\_sedanayasa@yahoo.com](mailto:bpr_sedanayasa@yahoo.com)

TABANAN, 25 April 2024

PT. BPR SEDANA YASA



Drs. Gede Nyoman Sukerta  
Direktur Utama



Gusti Bagus Mahaputra, S.E  
Komisaris Utama